



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjarnegara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-9-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-9-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 44 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,
Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- NAMA ORGANISASI : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
- TUGAS : 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEWAJIBAN : 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;
12. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL LAINNYA YANG BERDAYA SAING

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketahanan pangan	1. Regulasi ketahanan pangan 2. Ketersediaan pangan utama 3. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Ketersediaan energi dan protein per kapita 5. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 6. Penguatan cadangan pangan 7. Stabilisasi harga dan pasokan pangan 8. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 9. Penanganan daerah rawan pangan	KKP
2.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian yang berkualitas	1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Produktivitas padi (kw/ha) - Produktivitas Jagung (kw/ha) - Produktivitas Kedelai (kw/ha) 2. Produktivitas Tanaman Hortikultura - Durian (kg/pohon) - Salak (kg/pohon) - Pisang (kg/pohon) - Kentang (kw/ha) 3. Kontribusi sektor pertanian /peternakan/perikanan terhadap PDRB 4. Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian 5. Cakupan bina kelompok petani (%)	Dintankannak BPS
3.	Meningkatnya kesejahteraan Petani	1. Peningkatan Nilai Tukar Petani: - NTP Petani Tan. Pangan & Hortikultura - NTP Peternakan - NTP Perikanan	Dintankannak BPS
4.	Meningkatnya produksi peternakan	1. Peningkatan populasi ternak: - Sapi - Sapi Perah - Kambing - Domba 2. Presentase Keberhasilan Inseminasi Buatan - Perbandingan Jumlah Kelahiran dengan Pemakaian Semen	Dintankannak
5.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Produksi perikanan budidaya (ton) 2. Konsumsi ikan (kg/Kpt/th) 3. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 4. Produksi perikanan tangkap (ton)	Dintankannak

1	2	3	4
6.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan yang Berkualitas	1. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 2. Produktivitas perkebunan - Kopi Robusta (ton/ha) - Kopi Arabika (ton/ha) - Kelapa Dalam (ton/ha) - Kepala Deres (ton/ha) - Teh (ton/ha) - Karet (ton/ha) - Tebu (ton/ha)	Dinhutbun, BPS
7.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Kunjungan wisata (%) 2. Pendapatan sektor pariwisata (%)	Dinbudpar
8.	Meningkatnya kinerja perdagangan	1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Ekspor Bersih Perdagangan (Rp 000.000) 3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Dinperindag kop dan UMKM , BPS
1	2	3	4
9.	Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan	1. Persentase koperasi aktif 2. Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit) 3. Jumlah BPR/LKM (buah/unit) 4. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi 5. Jumlah bank	Dinperindag kop dan UMKM Bagian Perekonomian
10.	Meningkatnya jumlah investasi	1. Jumlah investor berskala nasional 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp 000.000) 3. Daya serap tenaga kerja 4. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 5. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap. 6. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya 7. Lama proses perijinan - HO - IMB - SIUP 8. Penggunaan Alun-alun 9. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	KP2T

1	2	3	4
11.	Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1. Rasio penduduk yang bekerja 2. Angka partisipasi angkatan kerja 3. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja 5. Tingkat pengangguran terbuka 6. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja 7. Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Dinsosnaker trans & BPS
12.	Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah	1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 3. Pertumbuhan Industri. 4. Cakupan bina kelompok pengrajin	BPS Dinperindag kop dan UMKM
13.	Meningkatnya produksi pertambangan dan Energi	1. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan 2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	DPSDA & ESDM
14.	Meningkatnya produksi hasil kehutanan	1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Berkurangnya Kerusakan Kawasan Hutan 3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Dinhutbun & BPS

MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	1. Rasio PNS Lulusan S1 2. Rasio PNS Lulusan S2/S3 3. Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim 4. Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur 5. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis, kursus dan bintek	BKD
2.	Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju inflasi kabupaten 3. PDRB per kapita (Rp 000) 4. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 5. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 7. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	Bappeda

1	2	3	4
3.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kab Banjarnegara	Inspektorat
		2. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi	
		3. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP	
		4. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	
		5. Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP	
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Bag. Organisasi
		2. Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	
		3. Pembinaan pelayanan publik	
		4. Tersedianya laporan asset yang mendukung laporan Neraca	DPPKAD
		5. Jumlah bidang lahan bersertifikat	Bag. Tapem
		6. Penyelesaian kasus tanah Negara	
		7. Cakupan sarana prasarana perkan toran pemerintahan desa yang baik	Bag. Pemdes
		8. Sistim Informasi Manajemen Pemda	Bag. Humas
		9. Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda	
5.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Meningkatkan jumlah PAD (Rp Milyar)	DPPKAD
		2. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	
		3. Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu	
		4. Opini Laporan Keuangan	
		5. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	
		6. Jenis, kelas dan jumlah restoran	Dinbudpar
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	1. Pengelolaan arsip secara baku	KPAD
		2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Kepemilikan KTP (%)	Dindukcapil
		2. Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali	
		3. Rasio bayi berakta kelahiran (%)	
		4. Rasio pasangan berakta nikah	
		5. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	
		6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	
		7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	
		8. Cakupan pelayanan penerbitan akta kelahiran	

8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	1. Jumlah surat kabar nasional/lokal	Bag.Humas
		2. Jumlah penyiaran radio/TV lokal	
		3. Web site milik pemerintah daerah	
		4. Pameran/expo	Bag. Perekonomian
		5. Pelaksanaan desiminasi pen-distribusian informasi nasional melalui:	Dinhubkominfo
		a. Media massa seperti majalah , radio dan televisise	
		b. Media baru seperti website	
		c. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya	
		d. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Dinbudpar
		6. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Dinhubkominfo
		7. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	Bag. Pembangunan
		8. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital	BAPPEDA

MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Satpol PP,
		2. Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam)	
		3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keter tiban, ketentraman, keindahan) di Kab. (%)	
		4. Jumlah demonstrasi	
		5. Cakupan petugas Linmas (%)	Kesbang pollinmas
		6. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	
		7. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	
2.	Menurunnya jumlah korban bencana	1. Persentase Bencana yang tertangani dengan baik	BPBD
		2. Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	
		3. Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap	
		4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	
		5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	

1	2	3	4
		6. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	1. Kegiatan pembinaan politik daerah 2. Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi	Kesbangpol linmas
4.	Meningkatnya pemahaman kebangsaan dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat	1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kesbangpol linmas, Dindikpora

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sarana infrastruktur yang menunjang iklim usaha investasi	1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) 2. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten 3. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 4. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman 5. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 6. Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten 7. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 8. Rasio Jaringan Irigasi (%) 9. Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	DPU
2.	Meningkatnya sarana dan pra-sarana perumahan yang layak huni	1. Rasio rumah layak huni (%) 2. Cakupan layanan rumah layak huni	DPU
		3. Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan 4. Rumah tangga pengguna air bersih 5. Rasio Rumah tinggal ber-Sanitasi 6. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 7. Rumah tangga pengguna listrik (%)	DPSDA & ESDM

1	2	3	4
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Dinhubkominfo
		2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	
		3. Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	
		4. Jumlah arus penumpang angkutan umum	
		5. Rasio ijin trayek	
		6. Jumlah uji kir angkutan umum	
		7. Jumlah Terminal Bis	
		8. Angkutan darat	
		9. Kepemilikan KIR angkutan umum (%)	
		10. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	
		11. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	
		12. Pemasangan Rambu-rambu (%)	
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana komunikasi	1. Jumlah jaringan komunikasi	Dinhubkominfo
		2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	
5.	Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur Perdesaan	1. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	DPU
6.	Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana	1. Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana	BPBD
7.	Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah	1. Penyelesaian izin lokasi (%)	KP2T
		2. Ketaatan terhadap RTRW	BAPPEDA
		3. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program	
		4. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	
		5. Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	DPU
8.	Terkendalinya pencemaran Lingkungan Hidup	1. Persentase penanganan sampah	DPU
		2. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	
		3. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	
		4. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	Dinkes

		5. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	Dinhutbun
		6. Pencemaran status mutu air	KLH
		7. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	
		8. Penegakan hukum lingkungan (%)	
		9. Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	
		10. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	
		11. Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan di informasikan status Kerusakannya	KLH
		12. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	
		13. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari	DPU
		14. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	
		15. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	
		16. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	
		17. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	
		18. Jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	
9.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi	1. Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi 2. Pemanfaatan potensi gas rawa	DPSDA & ESDM

MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan Partisipasi masyarakat	1. Angka melek huruf 2. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Dindikpora

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		5. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 9. Pendidikan dasar: a. Angka partisipasi sekolah: - Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun - Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru/murid SD/MI d. Rasio guru/murid SMP/MTs e. Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar 10. Pendidikan menengah a. Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah 11. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12. Angka Putus Sekolah: - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs - Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 13. Angka Kelulusan: - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 14. Angka Melanjutkan - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	
2.	Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan	1. Fasilitas Pendidikan: - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik - Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik - Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Dindikpora

1	2	3	4
		<p>2. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil</p> <p>3. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.</p> <p>4. Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik</p> <p>5. Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.</p> <p>6. Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.</p> <p>7. Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran</p> <p>8. Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan</p> <p>9. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.</p> <p>10. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.</p> <p>11. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta.</p>	

1	2	3	4
		12. Setiap SD/MI memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi.	
3.	Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	<p>1. Kualifikasi Guru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV <p>2. Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik.</p> <p>3. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantaranya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh perseratus)</p>	Dindikpora
		4. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	
		5. Disetiap SD/MI semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	
		6. Disetiap SMP/MTs semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	
		7. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	
		<p>8. Setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.</p> <p>9. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</p> <p>10. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.</p>	

1	2	3	4
		11. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat) kali dalam setiap semester. 12. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik 13. Kepala Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementrian Agama	
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Angka Rata-rata UN <ul style="list-style-type: none"> - Angka rata-rata UN SD/MI - Angka rata-rata UN SMP/MTs - Angka rata-rata UN SMA/MA - Angka rata-rata UN SMK 2. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I-II : 18 (delapan belas) jam per minggu; - Kelas III :24 (dua puluh empat) jam per minggu; - Kelas IV-VI: 27 (dua puluh tujuh) per minggu; - Kelas VII-IX: 27 (dua puluh tujuh) per minggu; 3. Satuan pendidikan menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku. 4. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Dindikpora
5.	Meningkatnya minat baca masyarakat	1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%) 3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	KPAD
6.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	1. Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 3. Persentase balita gizi buruk (BB/TB) 4. Persentase Posyandu Purnama 5. Persentase Posyandu Mandiri 6. Rasio posyandu per satuan balita	Dinkes Dinkes
		7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 8. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 9. Rasio dokter per satuan penduduk 10. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	Dinkes;

1	2	3	4	
		11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Dinkes;	
		12. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani		
		13. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		
		14. Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)		
		15. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)		
		16. Kesembuhan penderita TBC BTA Positif		
		17. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		
		18. Penderita malaria yang diobati		
		19. Jumlah penderita malaria baru (API)		
		20. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun		
		b. Penemuan penderita pneumonia balita		
		c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)		
		d. Penderita DBD yang ditangani		
		e. Penemuan penderita diare		
		21. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		
		22. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten		
		23. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		
		24. Cakupan kunjungan bayi		
		25. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		
		26. Cakupan pelayanan nifas		
		27. Cakupan pelayanan anak balita		
		28. Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani		
		29. Cakupan pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		
		30. Cakupan puskesmas		
		31. Persentase cakupan rawat jalan		
		32. Persentase cakupan rawat inap		
		33. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		Dinkes;
		34. Cakupan Peserta KB Aktif (%)		
		35. Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		
		36. Cakupan Desa Siaga Aktif		
		37. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat		
		38. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat		
		39. Persentase penduduk tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS)		
		40. Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan		

1	2	3	4
		41. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 42. Balita yang datang dan ditimbang 43. Balita yang naik berat badannya 44. Balita bawah garis merah 45. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun	
		46. Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun 47. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A 48. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 49. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif 50. Persentase desa dengan garam beryodium baik 51. Angka usia harapan hidup 52. BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%) 53. LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari) 54. TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari) 55. BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali) 56. Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis) 57. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit	BPS RSUD BKBPP
7.	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 2. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 3. Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5. Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan Social 6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan social	BPS

1	2	3	4
		7. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
8.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	1. Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	BKBPP
		2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	KPMD
		3. PKK aktif (%)	
		4. Posyandu aktif	
		5. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	
9.	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	BKBPP
		2. Persentase perempuan di lembaga legislative	
		3. Rasio KDRT	
		4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	
		5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	
		7. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	
		8. Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	
		9. Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum	
		10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	
		11. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	
		12. Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	
10.	Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera	1. Rata-rata jumlah anak per keluarga	BKBPP
		2. Rasio akseptor KB (%)	
		3. Jumlah peserta KB aktif	
		4. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	
		5. Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	
		6. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	
		7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	
		8. Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	

1	2	3	4
		9. Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa-(PPKBD) setiap desa / kelurahan 2 PPKBD 10. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD 11. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 12. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	
11.	Meningkatnya profesionalisme angkatan kerja	1. Rasio lulusan S1/S2/S3 2. Rasio ketergantungan 3. Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 5. Besaran pemeriksaan perusahaan 6. Besaran pengujian peralatan di perusahaan 7. Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 8. Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat 9. Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Dinsos nakertrans
12.	Meningkatnya Tertib Hukum	1. Persentase penyelesaian penanganan kasus 2. Penegakan PERDA	Satpol PP

MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah organisasi pemuda 2. Jumlah kegiatan kepemudaan	Dindikpora
2.	Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga	1. Jumlah organisasi olahraga 2. Jumlah kegiatan olahraga 3. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) 4. Lapangan olahraga 5. Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk 6. Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk	Dindikpora
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional	1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Dinbudpar

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		3. Gedung kesenian per 10.000 penduduk	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	1. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinbudpar

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO